

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Terjadinya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 banyak mengubah berbagai sektor pemerintahan tidak terkecuali sektor ekonomi. Sektor ekonomi di Indonesia banyak mengalami perubahan terutama pada bidang bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terdampak paling banyak pada sektor ekonomi pariwisata dan UMKM. Menurut penuturan Srie Nurkyatsiwi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY “Tercatat lebih dari 59% UMKM di sektor DIY mengalami kesulitan pemasaran sehingga mengakibatkan UMKM pada daerah tersebut mati suri”. Sejak di berlakukannya aturan PSBB yang mengakibatkan sektor pariwisata yang tutup selama pandemi Covid-19 mengakibatkan UMKM juga berhenti beroperasi selain kesulitan pemasaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah juga membuat UMKM kesulitan dalam mendapatkan bahan baku. Daerah yang menerapkan PSBB otomatis tidak bisa mengirimkan bahan baku yang dibutuhkan UMKM (Baskoro, 2020).

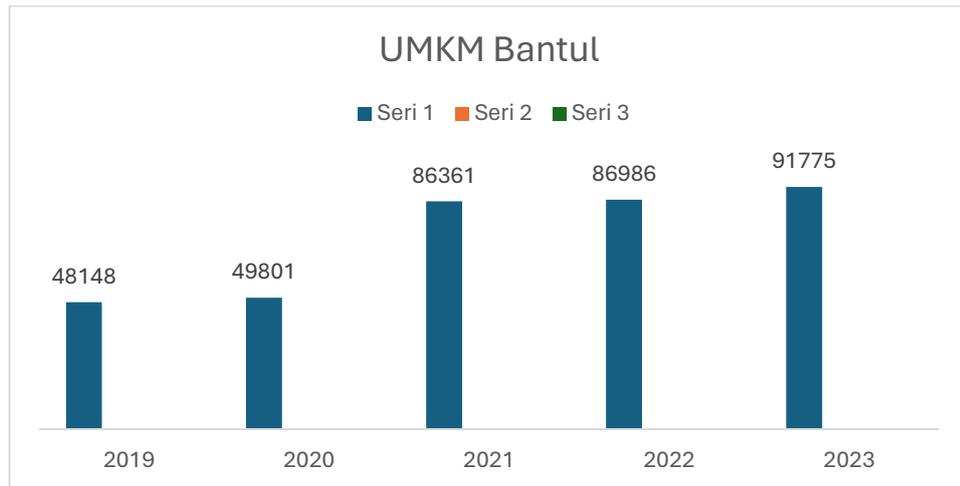
Adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga menimbulkan permasalahan pengangguran dikarenakan sedikitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya korban PHK yang mengharuskan pemerintah turun tangan dalam mengatasi permasalahan ini yang mana UMKM memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan sebagai sektor swasta yang menjadi sarana untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, mendorong roda perekonomian serta dapat mengurangi angka kemiskinan

(Idah et al., 2020). Walaupun UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam mengurangi angka pengangguran namun tidak dapat dilakukan dengan mudah di mana UMKM memiliki kendala yang besar seperti perubahan pasar yang cepat, perizinan yang kompleks, dan akses terhadap sumber daya yang terbatas, sehingga mengharuskan adanya transformasi dari konvensional ke bisnis digital.

Hal tersebut didukung dengan adanya Surat Edaran Gubernur Nomor 519/7669 tentang himbauan pembelian produk usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DIY dengan tujuan memulihkan kembali UMKM DIY yang sebelumnya sempat berhenti beroperasi dengan melibatkan pemerintah provinsi DIY serta jajarannya untuk lebih tanggap dan responsif dalam menjalankan Surat Edaran tersebut sehingga terciptanya inovasi yang dapat memberikan dampak positif terhadap UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Maka untuk mengimplementasikan Surat Edaran tersebut dan terciptanya Inovasi baru maka harus adanya adaptif dan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku UMKM untuk mewujudkan perubahan terhadap sistem UMKM yang lebih Agile Governance bagi pelaku UMKM DIY.

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil studi kasus salah satu daerah yang memiliki sektor UMKM yang cukup berpengaruh dan memiliki potensi UMKM di Yogyakarta (DIY) yaitu kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul sendiri merupakan salah satu Kabupaten di provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki sektor UMKM terbesar yang setiap tahunnya meningkat serta didukung dengan berbagai potensi daerah yang mendukung perkembangan UMKM.

Gambar 1. 1Jumlah UMKM Bantul 2019-2023



Sumber : data.bantulkab.go.id

Dari data di atas menunjukkan angka pertumbuhan UMKM Bantul dari tahun 2019-2023 yang menunjukkan angka pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang di mana pertumbuhan UMKM paling signifikan mulai meningkat pada tahun 2021 yang mana merupakan masa pemulihan dari adanya pandemi Covid-19 serta pertumbuhan para UMKM mulai bangkit dari dampak adanya pandemi setelah 2 tahun terakhir mengalami penurunan omset. Pada tahun 2021-2023 para pelaku UMKM mulai perlahan-perlahan mengenal platform digital dalam mempromosikan serta menjual barang mereka sehingga pada tahun 2023 jumlah UMKM Bantul mengalami kenaikan, yang menandakan Kabupaten Bantul memiliki potensi dalam pengembangan UMKM.

Kabupaten Bantul juga memiliki Industri kreatif ekonomi yang menjadi salah satu sektor unggulan kabupaten Bantul Selain pertanian dan pariwisata, Kabupaten Bantul memiliki industri kerajinan saat ini berkembang sangat pesat, terlihat dari barang-barang yang menjadi komoditas lokal dan diekspor ke banyak negara. Ada banyak macam usaha di Kabupaten Bantul, termasuk sektor kerajinan, dimana 70% barang kerajinan DIY berasal dari sana, antara lain toko gerabah, kerajinan kulit, aksesoris keris, batik, kerajinan bambu, kayu batik, dan lain-lain. sedemikian rupa

sehingga rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) menetapkan industri kreatif sebagai prioritas (Khoirunnisaa & Jihaan, 2021).

Kawasan Prioritas Pariwisata (KSP) DIY, Parangtritis dan sekitarnya, serta KSP Kasongan-Tembi menjadi prioritas pembangunan sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 193 Tahun 2017 dengan pengembangan IKM pada kabupaten Bantul membuat sektor UMKM juga menjadi sektor yang berpengaruh seperti halnya daerah lain yang menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor yang membantu perekonomian daerah serta dapat menjadi solusi dalam mengurangi angka pengangguran. UMKM di Bantul mencakup beberapa industri termasuk kerajinan tangan, pertanian, dan jasa, yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah Kabupaten Bantul perlu mengambil langkah-langkah konkret (Suryon, 2019).

Menurut Agus Sulistiyana UMKM Bantul merupakan salah satu Usaha Kecil Menengah yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 15,18 persen berdasarkan data BPS tahun 2019. Tetapi pada awal tahun 2020 Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa sektor UMKM mengalami penurunan omset serta adanya dinamika perubahan pasar pada era globalisasi dan digitalisasi sehingga menuntun UMKM untuk tetap berupaya dalam mengikuti perkembangan zaman namun perubahan pasar dan teknologi menjadi faktor kritis dalam mempengaruhi kelangsungan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia (Khoirunnisaa & Jihaan, 2021). Berikut data omset UMKM Bantul tahun 2019-2023 setelah terjadinya pandemi Covid-19 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul:

Gambar 1. 2 Data omset penjualan UMKM Bantul 2019-2023



(Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul)

Dari data grafik tersebut menunjukkan omset UMKM di kabupaten Bantul mengalami penurunan omset dari tahun 2019-2020 yang di akibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sektor UMKM Kabupaten Bantul. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun tersebut menyebabkan beberapa UMKM di Bantul terpaksa untuk berhenti beroperasi sementara selain adanya covid-19 adanya peraturan PSBB dari pemerintah juga menjadi faktor utamanya. Pada tahun 2021-2023 sektor UMKM mulai untuk bangkit kembali di tengah adanya pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan transformasi digital melalui berbagai sosial media serta platfrom yang di sediakan oleh pemerintah. Namun tidak semua sektor UMKM dapat beradaptasi dengan adanya transformasi dari era konvensional ke era digital hal tersebut sempat membuat beberapa UMKM tidak dapat bersaing dengan produk luar yang dapat beradaptasi dengan adanya digitalisasi. Walaupun omset UMKM mengalami kenaikan dari tahun 2019-2023 namun belum stabil seperti pada tahun sebelum terjadinya pandemi covid-19.

Penurunan omset UMKM di kabupaten Bantul berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan peningkatan angka pengangguran dikarenakan para pelaku usaha UMKM mengalami kerugian. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil

berbagai langkah untuk membantu UMKM, seperti pemberian bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan pemasaran digital, langkah pemerintah dalam mengembangkan pemasaran digital merupakan langkah yang tepat yang mana Inovasi bisnis sangat penting dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan Usaha UMKM di era digital (Zhafira, 2021).

Adanya transformasi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai industri, termasuk UMKM, dan telah mendorong munculnya model dan peluang bisnis baru. Platform e-commerce dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan mereka. Namun UMKM sering kali menghadapi tantangan signifikan dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa era revolusi 4.0 sehingga mendorong para pelaku bisnis atau UMKM mengikuti transformasi digital. Transformasi digital telah memberi dampak yang signifikan terhadap berbagai industri, termasuk UMKM sehingga mendorong munculnya model dan peluang bisnis baru. Adanya platform e-commerce dapat membantu UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan mereka (Triwijayati et al., 2023).

Perubahan perilaku konsumen yang saat ini semakin beralih ke platform digital, disebabkan karena pada platform digital atau biasa disebut e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan perdagangan yang dilakukan secara digital dalam mempromosikan dagangan serta melakukan jual-beli secara online. Perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja Online adalah fenomena yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi, platform e-commerce, dan tren sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam perilaku konsumen dalam online shop yang dapat menjadi perhatian bagi bisnis dan pemasar.

Kabupaten Bantul sendiri mengusungkan pengembangan bisnis melalui branding dan pemasaran produk lewat media sosial serta dapat menjalankan ekosistem digital atau e-commerce bagi pelaku UMKM Bantul. Untuk saat ini penggunaan platform digital yang di gunakan bagi para UMKM Bantul seperti Facebook, Shopee, serta Gofood dalam menjual dan mempromosikan barang mereka, serta di dukung dengan Platform SiBakul dalam pendampingan dan pelatihan digitalisasi bagi UMKM serta Platform BOS (Bantul Online Shop) sebagai inovasi dalam menyelesaikan masalah ekonomi di tengah pandemi. Adanya platform Sibakul dan Bos (Bantul Online Shope) di harapkan dapat mengembangkan UMKM dengan menerapkan aplikasi perdagangan elektronik berbasis mobile yang dapat di akses melalui android serta hadir untuk membantu pelaku UMKM di Bantul dalam memasarkan produknya dengan biaya yang minimal, jangkauan konsumen yang luas serta jumlah dan jenis barang yang terbatas (Hidayah, 2022)

Akan tetapi kebanyakan masyarakat lokal masih menggunakan metode penjualan konvensional atau lebih di sering dikenal dengan bisnis offline yang merupakan kegiatan transaksi jual-beli yang dilakukan secara langsung. Metode penjualan ini biasanya di lakukan oleh para UMKM daerah yang belum mengenal platform digital atau Gagap teknologi dalam penggunaan media sosial sehingga perlu mendapatkan pelatihan kewirausahaan dalam menggunakan platform digital (Nugroho, 2023).

Tindak lanjut yang dapat di berikan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi akibat perubahan pasar yang beralih ke platform digital bagi para pelaku UMKM tercatat dalam bidang manufaktur dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi, pemerintah memiliki tugas dalam membantu pertumbuhan bisnis. Sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021, pengembangan usaha di bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan meningkatkan kemampuan

manajemen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, dan bahan, serta meningkatkan teknik produksi dan pengolahan. mempromosikan penggunaan standardisasi dalam prosedur manufaktur dan pengolahan; meningkatkan kemampuan desain dan teknik; dan pemberian bantuan dan pengemasan barang-barang hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Untuk mendukung adanya kebijakan pemerintah sehingga perlu adanya kebijakan yang adaptif (Adaptif Governance). Prinsip adaptive governance merupakan prinsip-prinsip yang mengacu pada perubahan lingkungan yang terjadi. Konsep ini dipakai untuk menjelaskan kemampuan adaptif governance pada saat menghadapi tantangan atau hambatan eksternal (Hurlbert & Gupta, 2016). Seperti yang di hadapi oleh pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi pasca terjadinya pandemi covid-19

Pemanfaatan teknologi Dengan adanya platform digital dalam membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan Usaha mereka pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi pendekatan Agile Government yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan inovasi dalam merancang kebijakan publik (Zhafira, 2021). Salah satu bidang yang menjadi fokus dalam pendekatan ini adalah pemasaran digital. Pemasaran digital, yang mencakup penggunaan platform media sosial, optimisasi mesin pencari (SEO), iklan online, dan berbagai strategi digital lainnya, memiliki potensi besar untuk membantu UMKM memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas Online, dan meningkatkan penjualan oleh karena itu pemerintahan yang agile menjadi kunci utama yang di butuhkan pada era disrupsi saat ini. Keberhasilan penerapan agile governance sangat bergantung pada kapasitas serta kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada suatu daerah (Vernanda,2020).

Namun, meskipun memiliki potensi besar dalam pemasaran digital, masih banyak UMKM yang mengalami kendala dalam menjalankan dan mengimplementasikan secara efektif penggunaan platform media sosial sehingga hal tersebut menjadi permasalahan bagi masyarakat pelaku UMKM yang sulit beradaptasi dengan era globalisasi dan informasi saat ini sehingga mereka akan tertinggal ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti keterbatasan pengetahuan dan sumber daya serta ketidakpastian tentang strategi yang tepat sehingga menjadi hambatan. Sehingga penting untuk menginvestasikan lebih lanjut bagaimana kebijakan Agile Government dalam mendukung UMKM dan memanfaatkan pemasaran digital dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi.

Di tengah perubahan kebutuhan pasar yang menginginkan semua di lakukan secara Online dan cepat tetapi masih banyak pelaku UMKM yang mengandalkan penjualan tradisional atau permintaan transaksi langsung atau tatap muka dari pelanggan di akibatkan masih ada pelaku UMKM yang tidak terbiasa dengan sistem penjualan Online . (Idah et al., 2020) maka dari itu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi antara pelaku UMKM dan konsumen dalam mengatasi kebutuhan yang berubah-ubah serta mendukung UMKM yang lebih adaptif dan berkelanjutan maka perlunya pemerintah menerapkan konsep “agile government“ atau pemerintah yang adaptif sebagai pendekatan yang baru dalam menekan responsivitas, kolaborasi dan kemampuan adaptasi dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 telah menyebabkan banyaknya perubahan serta kompleksitas problematis salah satunya terkait dengan UMKM, salah satu daerah yang berdampak terkait dengan pandemi dan perubahan

pasar adalah kabupaten Bantul yang dimana kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak UMKM namun sejak pandemi mengalami penurunan pendapatan sehingga pemerintah kabupaten Bantul perlu untuk menetapkan agile governance dalam mengatasi permasalahan ini sehingga dapat memunculkan inovasi baru dalam menghadapi perubahan pasar di era digitalisasi sehingga permasalahan penelitian ini berfokus pada “Bagaimana penerapan Adaptive Dan Collaborative Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Mewujudkan Agile Government Bagi Pelaku UMKM”

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penyelenggaraan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah kabupaten Bantul dalam menyesuaikan diri dengan penerapan Agile Government pada perubahan pasar dan teknologi serta bagaimana cara pemerintah melakukan kolaborasi dalam mewujudkan Agile Government bagi pelaku UMKM dengan dilakukannya Adaptive Dan Collaborative oleh pemerintah kabupaten Bantul. Maka peneliti mampu memperdalam kajian tersebut agar dapat menganalisis sejauh mana pemerintah kabupaten dalam menangani permasalahan UMKM dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi pasca terjadinya pandemi sehingga memberikan manfaat yang kongkrit baik dalam wujud penelitian ataupun sebagai evaluasi pemerintah agar lebih baik kedepannya.

1.4 Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta Untuk memperkaya kajian kebijakan dengan pendekatan Adaptive Governance di Indonesia terutama pada sektor UMKM kabupaten Bantul dalam melakukan inovasi dengan menerapkan kebijakan agile government yang di aplikasikan dalam membantu UMKM daerah.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan tolak ukur bagi Pemerintah kabupaten Bantul dalam menerapkan kebijakan dengan pendekatan Adaptive dan Colaborative Dalam Mewujudkan Agile Government Bagi Pelaku UMKM Serta, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah kabupaten bantul dan masyarakat pada umumnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berikut merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang adaptive dan collaborative peran pemerintah dalam mewujudkan agile government bagi pelaku UMKM

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Darumurti et al., 2023)	Agile Governance Dalam Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Inovasi Bantul Sehat Ekonomi Karo Jamu)	Temuan dari penelitian ini untuk melihat upaya pemerintah kabupaten Bantul dalam meningkatkan kapasitas pelayanan publik pasca pandemi Covid-19 melalui pelaksanaan program inovasi bantul sehat Ekonomi Koro Jamu (Bantul Seroja) yang dituju dalam paradigma agile governance.
2	(Triwijayati et al., 2023)	Strategi Inovasi Bisnis untuk Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Organisasi di Era Digital	Temuan dari penelitian ini membahas tentang inovasi bisnis yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah(UMKM) pada era digital. Seperti adanya platform e-commerce yang dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pasar serta dapat meningkatkan penjualan pelaku UMKM. sehingga para pembuat kebijakan di dorong dalam memfasilitasi inklusivitas dan ekosistem mendukung serta UMKM di dorong untuk menerapkan inovasi berbasis teknologi.

3	(Khasanah & Purwaningsih, 2021)	Analisis Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Psbb Pada Penanganan Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020	Penelitian ini membahas terkait strategi Collaborative dalam mengimplementasi kebijakan PSBB dalam menangani pandemi Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020.
4.	(Faidati & Mutmainah, 2020)	Collaborative Governance in Accelerating MSME Adaptation in Facing the Era of the Industrial Revolution 4.0 in DIY	Penelitian ini membahas tentang perlunya tata kelola kolaboratif dalam pengembangan UMKM di DIY pada era reformasi industri 4.0 yang merupakan strategi bersama yang di sepakati bersama dalam meningkatkan daya saing UMKM di DIY. Kolaborasi yang terbentuk dalam konteks ini diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan dari masing-masing pemangku kepentingan seperti dinas koperasi dan UMKM tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dinas perdagangan kabupaten, asosiasi dunia usaha di tingkat kecamatan, kabupaten/ kota, BUMN.
5.	(Muhammad et al., 2022)	Adaptive, Agile dan Robust Governance untuk Menjaga Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19	Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem daerah dapat beradaptasi dengan sistem pemerintahan yang agile setelah pandemi covid-19 serta bagaimana implementasi kebijakan terhadap efektivitas penanggulangan covid-19 oleh pemerintah, keberhasilan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah akan sangat di pengaruhi oleh faktor-faktor implementasi kebijakan yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi.
6.	(Kumorotomo, 2020)	Envisioning Agile Government: Learning from the Japanese Concept of Society 5.0 and the Challenge of Public Administration in Developing Countries	Temuan dalam penelitian ini yaitu Kolaborasi sains dan ilmu sosial diimpikan pemerintah Jepang kepada generasi mudanya, yang dapat diterapkan dalam konteks Pemerintahan Kabupaten Bantul yang Adaptif dan Kolaboratif dalam mewujudkan Agile Government bagi para pelaku UMKM. perlunya inovasi dalam mengani permasalahan UMKM/1akibat dampak Covid-19 serta era 5.0 yang mana/1UMKM

			dituntut untuk mampu melakukan kreativitas dan inovasi dalam mengatasi permasalahan tersebut
7.	(Mutiarin et al., 2022)	Pemberdayaan Tata Kelola Kelompok Karawitan Dan UMKM Berbasis Teknologi Informasi Untuk Promosi Budaya Jawa	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses pemberdayaan terhadap masyarakat yang bekerja di industri seni dan budaya. Serta memberikan dampingan dalam tata kelola kelompok karawitan dan UMKM berbasis teknologi dalam mempromosikan budaya jawa, sehingga dapat meningkatkan kegiatan perekonomian daerah berbasis digital bagi UMKM .
8.	(Suryawati et al., 2023)	Model Pendekatan Adaptif sebagai Upaya Membangkitkan Resiliensi	Temuan dari penelitian ini yaitu Temuan penelitian ini dapat berkontribusi pada proses pelaksanaan kebijakan yang saat ini dilakukan cenderung top down dan money follow program, alhasil dengan tata kelola kebijakan skema pendekatan adaptif dapat memberikan inklusivitas dan memperkuat daya tahan pelaku UMKM. Pemerintah pusat maupun daerah merupakan penanggung jawab utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat saat ini dengan upaya pembangkitan resiliensi para pelaku UMKM / pelaku usaha menjadi hal penting yang perlu dilakukan.
9.	(Nurjanah & Sakir, 2021)	Pemberdayaan UMKM Peyek Santoso Imogiri Bantul Melalui Digital Marketing	Temuan dari penelitian ini yaitu peran pemberdayaan masyarakat terhadap pemberdayaan UMKM peyek Santoso Imogiri Bantul melalui Digital Marketing dalam pengembangan UMKM peyek Santoso Imogiri Bantul. sehingga membantu proses pemasaran yang mencakup semua lembaga untuk saling berkomunikasi dan menyampaikan nilai bagi pelanggan.
10	(Janssen & Voort, 2020)	Agile and adaptive governance in crisis	Penelitian ini membahas tentang kemampuan pemerintah dalam

		response: Lessons from the COVID-19 pandemic	beradaptasi dengan adanya pandemi covid-19. Pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga semi-publik dan organisasi swasta, bekerja sama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di tingkat operasional. Penelitian ini menunjukkan kelincahan dan adaptasi pemerintah belanda dalam mengatasi covid-19 dengan penerapan sistem adaptif yang memerlukan mekanisme berpusat dan desentralisasi, inovasi dan birokrasi sehingga dapat menangani pandemi saat itu.
11	(Syafiqurrohman & Atmojo, 2023)	Mengarusutamakan Pemerintahan Cergas melalui Aplikasi SiBakul Jogja selama Masa Pandemi COVID-19	Penelitian ini membahas terkait pandemi covid-19 yang berimbas terhadap berbagai sektor terutama sektor ekonomi pada bidang UMKM. sehingga di perlukan inovasi baru dalam menjembatani UMKM agar mampu bertahan di tengah krisis pandemi Covid-19 melalui pengembangan platfrom sibakul Jogja. Sehingga dapat mengkaji terkait penerapan Sibakul sebagai inovasi dari pemerintahan provinsi DIY.
12.	(Pertiwi & Darumurti, 2021)	Collaborative Governance in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises Through Sibakul Jogja free-Ongkir During Covid-19	Kajian artikel ini mengkaji sebuah penemuan—Sibakul Jogja—yang dirilis UKM Dinkop DIY. Sibakul Jogja merupakan inovator yang mengadaptasi dan membina hubungan dengan berbagai pihak untuk memberikan akses yang sama terhadap pemasaran digital bagi seluruh UMKM di DIY. Salah satu alat analisis utama yang digunakan untuk mengetahui pola konektivitas dan hubungan antara Sibakul Jogja, UMKM, JKN, Gojek, dan Grab-food adalah tata kelola kolaboratif.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2020-2023

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masing-masing memberikan paparan tentang bagaimana penerapan Agile Governance dalam melakukan inovasi atau

pembaruan terhadap sektor ekonomi, khususnya UMKM. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi UMKM pada era transformasi setelah terdampak pandemi Covid-19. Pada era transformasi digital saat ini mempengaruhi UMKM dikarenakan adanya perubahan pasar yang mengharuskan para pelaku UMKM dapat mengikuti perkembangan zaman saat ini sehingga perlunya peran pemerintah dalam menangani permasalahan pasar. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana pemerintah dalam beradaptasi dan kolaborasi dalam mewujudkan agile Governance pada daerah kabupaten Bantul. Penelitian ini berfokus pada pemerintahan kabupaten Bantul karena kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah UMKM terbanyak sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi di UMKM

Kajian literatur di atas tentunya menjadi salah satu tolak ukur dari penelitian terkait Adaptive Dan Collaborative dari pemerintah terhadap penerapan Agile Governance di UMKM. Serta perlu dilakukannya analisis terhadap bagaimana keterkaitan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain agar dapat membedakan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu.

Pembahasan mengenai agile governance pada jurnal ataupun artikel serta kajian masih sangat minim karena masih asingnya pemahaman terkait inovasi agile governance di Indonesia. Maka dalam penerapan agile governance pemerintah harus menerapkan Collaborative antara pemerintah pusat hingga dalam mengimplementasikan ke dalam sebuah program yang berkelanjutan. Untuk melakukan inovasi maka harus adanya Adaptive Dan Collaborative Pemerintah Kabupaten Bantul

Dalam Mewujudkan Agile Governance bagi Pelaku UMKM sehingga dapat membantu UMKM untuk terus berkembang di saat era transformasi digital.

1.6 Kerangka Teori

Pemerintah kabupaten Bantul, sebagai entitas pemerintahan lokal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Serta bagaimana pemerintah menjalankan sistem Adaptive Dan Collaborative dalam mewujudkan Agile Government Bagi Pelaku UMKM.

1.6.1 Adaptive dan Colaborative

a. *Definisi adaptif Government*

Definisi dari pemerintahan adaptive mengacu pada pemerintahan yang mampu merespons perubahan dengan cepat, termasuk tantangan dan peluang, dengan ketangkasan dalam aspek digital dan fisik dari misi dan model operasionalnya untuk terus memaksimalkan manfaat bagi pemangku kepentingan (Cheng et al., 2015). Penerapan sistem Pemerintahan yang adaptif memerlukan kemampuan untuk mentransformasi model bisnis, proses, dan layanan, serta penciptaan kelincahan intrinsik dalam operasional saat ini dan masa depan (Morgan et al., 2023).

Menurut (Janssen & van der Voort, 2016) Tata kelola yang adaptif sangat penting agar pemerintah tetap stabil, akuntabel dan responsif dalam menghadapi gangguan dan perubahan yang berkelanjutan. Perencanaan ini tidak hanya membutuhkan pembangunan organisasi yang bertransformasi secara digital, namun di perlukan pemerintahan yang adaptif dengan ketangkasan intrinsik yang tercermin dalam operasi digital serta proses digital dalam merespons gangguan yang terus menerus secara langsung (Evans & D, 2023)

Prinsip adaptive governance merupakan penerapan prinsip-prinsip governance dengan mengacu pada perubahan lingkungan yang konsep ini di gunakan dalam rangka untuk menjelaskan kemampuan adaptasi pemerintah dalam menghadapi tantangan serta hambatan eksternal (Wang et al., 2017). Penerapan adaptive governance melibatkan adanya saling ketergantungan terhadap praktik teknologi dengan kebijakan yang publik baik dalam merumuskan kebijakan untuk mendesain struktur organisasi maupun implementasi kebijakan pemerintahan.

Berikut merupakan prinsip-prinsip dari penerapan adaptive governance berdasarkan kajian literatur di antaranya:

1. Cepat dan responsif dalam merespons perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di mana dengan penerapan adaptive dapat cepat dan responsif dalam mengontrol peraturan atau peran formal dalam memberikan respons terhadap masyarakat dalam penanganan suatu permasalahan.
2. Fleksibilitas (Flexibility): Pemerintah harus memiliki fleksibilitas dalam merancang kebijakan dan program. Mereka harus dapat berubah, menyesuaikan, dan memodifikasi kebijakan mereka ketika perlu.
3. Inovasi (Innovation): Pemerintah harus mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. Mereka harus mencari cara baru untuk memecahkan masalah dan meningkatkan efisiensi.
4. Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (Evidence-Based Decision Making): Keputusan pemerintah harus didasarkan pada bukti dan data yang tersedia. Pemerintah harus memahami tren dan fakta yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Prinsip-prinsip adaptive governance di harapkan dapat memberikan kerangka kerja yang dapat relevan dan efektif serta dapat mempercepat transisi dalam

pengelolaan pemerintah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kompleks sehingga mendorong pemerintah lebih responsif, inovatif dan kolaboratif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika lingkungan (Norman et al., 2020)

Penerapan tata kelola yang adaptif pada sistem pemerintahan juga penting dalam merespons suatu permasalahan, seperti yang terlihat selama pandemi Covid-19. Pemerintah harus lebih tangkas dan adaptif dalam mengapi pandemi ini, termasuk dengan perubahan pola kehidupan masyarakat yang bertransformasi ke era digital yang mana masyarakat banyak menggunakan sistem Online dalam kehidupan sehari-hari selama terjadinya pandemi covid-19 sehingga pemerintah harus mengeluarkan inovasi baru dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan agar dapat berkembang di era digital (Janssen & Voort, 2020).

Dengan penerapan sistem pemerintahan yang adaptive dapat berfungsi dalam meningkatkan peran stret level birokrasi, regulasi dan manajemen lainnya. Dengan adanya adaptive governance juga dapat menimbulkan kolaborasi antara aparatur pemerintah dalam mendefinisikan kembali peran mereka dan memfasilitasi tujuan pemerintah dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi perubahan saat ini.

b. Definisi Collaborative governance

Collaborative governance secara lebih singkat menjelaskan mengenai kerjasama antara berbagai pihak atau pemangku kepentingan dalam mencapai suatu tujuan. Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah kerjasama, interaksi, kompromi yang dilakukan oleh beberapa unsur pihak yang terlibat, baik individu maupun lembaga kelompok yang turut menerima manfaat dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik penerimaan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini

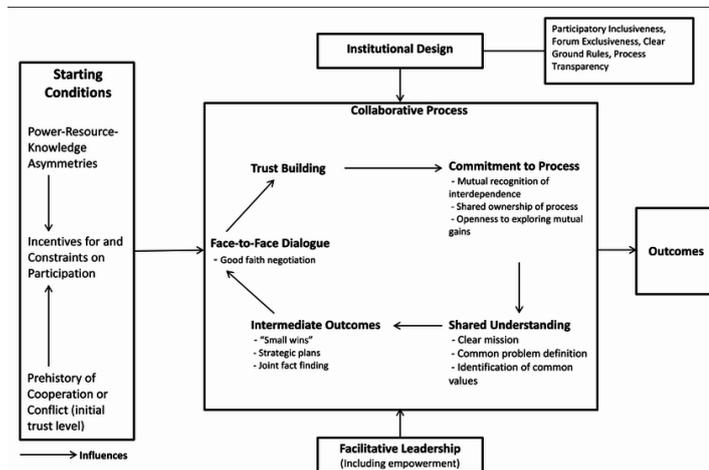
semua mempunyai manfaat. tujuan yang sama terkait dengan apa yang ingin mereka capai dalam kolaborasi

Menurut (Ansell & Gash, 2008) Collaborative governance merupakan suatu pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga politik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola aset publik. kemudian menurut (Newman et al., 2004) menyatakan collaborative Governance sebagai strategi dalam menyelesaikan beberapa persoalan melalui kebijakan yang menekankan pada kemitraan, partisipasi dan peningkatan kapasitas lokal. Pemerintah memiliki peran sebagai motivator dalam mengerakkan program dan keselarasan antar pemangku kepentingan yang terlibat sehingga dapat menciptakan kerjasama yang efektif dan pemanfaatan potensi lokal secara maksimal dengan tujuan bersama.

Sementara itu, (Fatmawati 2016) merumuskan bahwa collaborative governance merupakan perumusan sebuah pengaturan dimana satu atau lebih dari suatu badan maupun lembaga publik bersama para stakeholder non negara, berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan mengembangkan dan melaksanakan kebijakan publik. berdasarkan gagasan tata kelola kolaboratif yang dijelaskan di atas, sehingga dapat di simpulkan bahwa perlunya kerja sama antar stakeholders dengan non-negara yang saling bergantung dalam mencapai suatu tujuan yang sama. Keterlibatan antar aktor tata kelola yang saling menguntungkan dan menggabungkan norma-norma yang disepakati dikenal sebagai tata kelola kolaboratif. (Iumwmn, 2017).

Pada proses kolaborasi ini Ansel dan Gash memberikan gambaran bahwa setiap prosenya memiliki berbagai komponen mulai dari starting condition, fasilitative leader, institusional design, collaborative proses.

Gambar 1. 3 Kerangka Kerja Collaborative Governance



Sumber: Ansel dan Gash

(Ansell & Gash, 2008) menjelaskan collaborative governance terdiri dari 4 variabel utama yaitu

1. Kondisi awal

Merupakan kondisi prasyarat yang harus ada sebelum suatu kerjasama dapat dimulai, baik dalam bentuk kerjasama maupun fasilitasi antara pihak-pihak yang berkepentingan, lembaga, atau pemegang saham yang mempunyai kesamaan tujuan yang ingin dicapai melalui kerjasama. Berhasil atau tidaknya suatu kerjasama dapat dipengaruhi oleh kondisi awal yang dapat mempengaruhi unsur-unsur yang ada sebelum proses kerjasama tersebut dimulai. Kondisi yang bersifat sosial, politik, ekonomi, dan budaya merupakan contoh dari unsur-unsur tersebut. Menentukan akar penyebab hambatan implementasi di antara banyak pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam proses kerja sama merupakan tujuan dari kondisi awal.

2. *Desain kelembagaan/ institusional.*

Desain kelembagaan mengacu pada kerangka kerja dan protokol yang digunakan untuk mengatur proses kolaborasi sedemikian rupa sehingga mendorong kerja sama dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan.

3. *Kepemimpinan*

Di semua jenis organisasi, bahkan organisasi kolaboratif, kepemimpinan sangatlah penting. Menyelesaikan perselisihan, memupuk kepercayaan, dan mencapai tujuan kelompok semuanya dimungkinkan oleh kepemimpinan yang efektif.

4. *Proses kolaboratif*

Proses kolaborasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan bersama. Proses kolaborasi yang efektif dapat menghasilkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. proses kolaborasi menurut ansell dan Gash:

a. Face to face dialoge

Dalam collaborative governance di perlukan dialog tatap muka antar para stakeholder atau tiap pemangku kepentingan yang ada sebagai sebuah proses yang berorientasi pada konsensus, memunculkan kesempatan bagi setiap pemangku kepentingan untuk menganalisis berbagai peluang maupun keuntungan bersama. Dialog tatap muka merupakan sebuah cara untuk memecah kecurigaan antara pelaku kepentingan dalam membangun sebuah kolaborasi dan mencegah eksporasi keuntungan bersama di tahap awal sebuah kolaborasi karena yang di tetapkan pada tahap awal adalah bagaimana

cara membangun konsensus bukan untuk mengatur keuntungan masing-masing pelaku kepentingan.

b. membangun kepercayaan (Trust Building)

dalam suatu proses kolaborasi di perlukan suatu kepercayaan, kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dari sebuah proses kolaborasi. Membangun kepercayaan menjadi satu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antar stakeholder agar dapat membentuk komitmen dalam menjalankan kolaborasi

c. komitmen terhadap proses (commitment to process)

Komitmen dalam proses kolaborasi yang kuat sangat di perlukan dalam sebuah proses kolaborasi. Komitmen dalam sebuah kolaborasi merupakan variabel utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya sebuah kolaborasi sehingga mampu mencegah risiko yang terjadi.

d. Share Understanding

Dalam melaksanakan kolaborasi para stakeholder harus mengembangkan sikap saling memahami terhadap suatu tujuan yang akan di capai. Share understanding dapat di sebut juga sebagai visi-misi bersama, kesamaan niat, tujuan yang jelas dapat juga di artikan sebagai kesepakatan dalam mendefinisikan sebuah masalah.

e. Hasil sementara (intermediate Outcomes)

Hasil dari proses kolaborasi dapat tercapai dalam bentuk hasil yang nyata, sehingga relatif dapat dikatakan konkrit ketika adanya kemungkinan keberhasilan dari kolaborasi. Dalam Proses intermediate outcomes tidak dapat di generasikan sebagai hasil akhir yang dicapai

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat di simpulkan bahwa pengertian collaborative governance merupakan suatu usaha dan respons pemerintah dalam menangani permasalahan pemerintahan dan pelaksanaan program pemerintahan lainnya dimana pemerintah memerlukan kerja sama yang melibatkan organisasi publik, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat dalam suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, collaborative governance dapat membantu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang berkaitan dengan pengembangan.

Dalam proses kolaborasi yang dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008) ada 5 tahapan dalam melakukan proses kolaborasi yang tergambar dalam bagan berikut:

Gambar 1. 4 Proses Kolaborasi Antar Stakeholder (Collaborative Governance) Hasil Kombinasi dan Elaborasi



Sumber (Khairurrasyid & Darumurti, 2022)

Setiap proses kerjasama harus melibatkan komunikasi dan diskusi; menurut Ansell dan Gash, dialog adalah kunci untuk menghilangkan hambatan lain dalam komunikasi peserta. Selain itu, diskusi memberikan landasan untuk mengembangkan rasa saling menghormati, percaya, dan pengertian. Emerson, Nabatchi, dan Balogh berpendapat bahwa agar kolaborasi dapat berhasil dalam jangka panjang, kepercayaan adalah komponen yang sangat penting. Perkembangan kepercayaan terjadi secara bertahap ketika orang-orang bekerja sama. Peserta belajar untuk mengenal satu sama

lain dan menunjukkan satu sama lain keandalan mereka dalam mencapai tujuan (Khairurrasyid & Darumurti, 2022).

c. Peran Adaptive Dan Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM

Adaptive dan collaborative Governance memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling melengkapi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Collaborative Governance memungkinkan pemerintah untuk bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta dan akademisi dalam memecahkan permasalahan publik yang kompleks. Pemerintahan yang adaptif disisi lain menekankan pentingnya kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Emerson & Andrea, 2014).

Dengan penerapan collaborative governance dapat membantu pemerintahan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan serta sistem pemerintahan yang adaptif dan collaborative keduanya menekankan pada pengembangan kapasitas pemerintahan dan partisipan dalam meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik (Kallis et al., 2009)

Pengembangan UMKM pasca terjadinya pandemi Covid-19 membuat beberapa UMKM mengalami kerugian hingga gulung tikar, hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor seperti pembatasan mobilitas, penutupan tempat usaha dan penurunan daya beli masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan ini pemerintah tentunya harus turun tangan dalam mengatasi permasalahan ini.

Penerapan tata kelola yang adaptif pada sistem pemerintahan juga penting dalam merespons suatu permasalahan, seperti yang terlihat selama pandemi Covid-19. Pemerintah harus lebih tangkas dan adaptif dalam mengapi pandemi ini. Pemberlakuan sistem pemerintahan yang collaborative juga penting dalam menangani permasalahan ini pemerintah maupun non pemerintah melakukan kolaborasi atau musyawarah seperti

organisasi nirlaba dan pemerintahan yang mendukung kewirausahaan dengan program pendanaan, pelatihan dan sumber daya untuk memulai bisnis yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. pemerintah juga bekerja sama dengan para UMKM dalam memperluas produk lokal yang terdampak pandemi agar dapat berkembang kembali. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam menyusun program-program kredit khusus untuk UMKM, termasuk program-program yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan adaptive dan collaborative governance, pemerintah dapat lebih efektif dalam mendukung pengembangan UMKM. Hal ini dapat membantu UMKM untuk bertahan dan berkembang, serta berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan berbagai pihak lainnya dapat menciptakan ekosistem yang responsif dan fleksibel bagi pengembangan UMKM, sementara pengembangan kapasitas pemerintah dan partisipan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.

Dalam pengembangan Collaborative terdapat 8 item yang di jadikan tolak ukur menurut DeSeve (Moore, 2009) Berikut adalah item-item yang dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan collaborative governance menurut DeSeve (Moore, 2009):

1. Struktur jaringan
2. Komitmen terhadap tujuan
3. Kepercayaan
4. Keterbukaan dan transparansi

5. Keterlibatan aktor non-negara
6. Norma bersama dan interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak aktor
7. Tujuan positif dari masing-masing pihak tercapai
8. Keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama

Item-item tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai kolaborasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pengembangan UMKM, *collaborative governance* dapat membantu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan berbagai pihak lainnya dapat menciptakan ekosistem yang responsif dan fleksibel bagi pengembangan UMKM, sementara penggunaan teknologi dan data dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.

1.6.2 Agile Government

a. Definisi Agile Government

kajian terhadap organisasi publik atau pemerintahan nampaknya menjadi yang pertama memperkenalkan gagasan agile government. Maka dari itu kita harus memahami apa itu agile government. Awalnya, (Overby, 2006) menegaskan bahwa istilah “agile government.” mengacu pada bidang studi yang dikenal sebagai “rekayasa perangkat lunak”, yang bertujuan untuk mempercepat dan mengadaptasi perangkat lunak (Janssen & Voort, 2020). Menurut (Sumanti et al., 2021), pengertian agile government. cocok diterapkan pada organisasi publik atau pemerintahan yang menuntut kinerja cepat dan akuntabilitas tingkat tinggi.

Sehingga Agile government. dapat dikatakan sebagai pendekatan pengembangan perangkat lunak yang merespons dengan cepat situasi kebutuhan yang berubah dengan cepat dan terjadi dalam periode waktu singkat. Kinerja aplikasi dan kerja tim adalah dua gagasan mendasar yang mendasari keputusan tata kelola tangkas. Kinerja program dicapai dengan mengurangi dokumentasi. Kolaborasi tim yang dimaksud akan terdiri dari dua atau lebih programmer yang mengerjakan satu fitur sambil menjaga komunikasi yang erat dengan pelanggan (Rianto et al., 2022).

Menurut (Malik et al., 2023) Agile Government adalah konsep pemerintahan yang menekankan perlunya pemerintahan untuk bersifat adaptif, responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan lingkungan terutama pada era 4.0 saat ini yang mengharuskan pemerintah ataupun masyarakat beradaptasi dengan adanya teknologi. Namun di Indonesia sendiri mendapatkan tantangan dalam praktiknya khususnya pada sistem kapasitas, kapabilitas, aksesibilitas penggunaan akan Teknologi dan Komunikasi (TIK) serta tingkat pembangunan di beberapa wilayah di Indonesia.

Sehingga dapat dikatakan bahwa agile government. merupakan konsep pemerintahan yang menerapkan sistem cerdas dan tangkas dalam sistem pemerintahannya yang bersifat adaptif, responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan lingkungan pada era transformasi 4.0 penerapan agile government. di perlukan dalam sebuah organisasi pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi birokrasi di Indonesia terutama di tengah pandemi covid-19.

Penerapan agile government perlu di respons dengan formula revolusi mental birokrasi agar pemerintahan dapat secara cepat berubah menjadi lebih lincah, inovatif dan responsif sesuai tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pemerintah yang gesit memiliki kapasitas untuk memenuhi dan memahami kebutuhan publik dalam

jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan untuk memudahkan pemerintah dalam mewujudkan agile government pemerintah perlu tahu akan posisi 4.0 sebagai landasan awal yang dapat membantu pada konsep tertentu. Dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintah melalui pemanfaatan dari teknologi informasi atau sering disebut e-government. Dalam e-government memiliki beberapa sistem baku di dalamnya seperti e-Health, e-Musrenbang, e-planning, e-Budgeting, e-Precurement, serta e-monev adanya aplikasi-aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah sistem birokrasi bagi masyarakat dalam mengakses dan memperoleh pelayanan dan interaksi dengan pemerintah dan dapat diakses selama 24 jam (Luna et al., 2015).

Konsep agile government. atau pemerintahan yang cerdas menjadi suatu kebutuhan pada setiap negara dan daerah, kecepatan pemerintah yang tangkas memiliki area domisi dalam memahami peraturan di masing-masing bidang yaitu tangkas pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek tangkas, akuisisi tangkas dan evaluasi tangkas. Walaupun konsep yang agile government. sangat dibutuhkan terhadap birokrasi/ organisasi publik, namun konsep agile government. tidak dapat menjadi patokan kesesuaiannya dengan birokrasi di Indonesia karena tidak ada konsep yang sesuai di dalam pengelolaan organisasi/ birokrasi di Indonesia (Mergel et al., 2018). Dengan agile governance di harapkan pada birokrasi Indonesia di harapkan akan terdapat sebuah bentuk akuntabilitas yang tinggi, penyesuaian organisasi dan kebijakan agar konsep ini dapat berjalan walaupun memerlukan waktu dan penyesuaian (Aripin et al., 2021)

Penerapan birokrasi atau organisasi pemerintahan di perkirakan akan lebih mudah beradaptasi dan inovatif sebagai hasil strategi agile government. Tata kelola yang tangkas dapat terbentuk ketika kapabilitas tangkas dapat bertemu dan berkoordinasi dengan kapabilitas pemerintah, sehingga peningkatan pelayanan

pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan pendekatan agil government dapat digunakan oleh karena itu konsep agile government (Janssen & Voort, 2020). memberikan gambaran baik kepada para pemerintah ataupun sektor terkait untuk bersama mengimplementasikannya. Penerapan agile government. perlu di dukung dengan sumber daya pendukung seperti infrastruktur, teknologi, jaringan lainnya agar dapat berjalan secara maksimal pada publik khususnya pemerintahan.

Agile government merupakan kemampuan pemerintah dalam cepat dan fleksibel dalam merespons sebuah perubahan kebutuhan dan tuntutan yang tidak terduga untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin berubah (Mergel et al., 2018) gagasan agile government ini merupakan suatu penerapan sistem manajemen dalam menciptakan struktur organisasi yang responsif dan cepat ke dalam sistem tata kelola pemerintahan dengan menciptakan struktur organisasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi dan antisipasi terhadap lingkungan disruptif di berbagai sektor. Indikator dalam Agile Government:

1. Respon: Kapasitas pemerintah dalam memberikan layanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dalam menghadapi COVID-19, pemerintah harus responsif.
2. Adaptasi strategis: Untuk mengatasi berbagai perkembangan, pemerintah harus cepat beradaptasi.
3. Efektif dan efisien: Pemerintah dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam menanggapi perubahan keadaan dan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
4. Memiliki manajemen antisipasi permasalahan di masa depan: Pemerintah dapat memahami berbagai perkembangan sehingga dapat mengurangi risiko dengan meminta manajemen memperkirakan potensi permasalahan.

b. Prinsip-prinsip agile governance

Luna dkk (2015) memberikan 6 Prinsip yang perlu untuk diketahui dan juga menjadi landasan praktis dalam mengimplementasikan agile governance diantaranya adalah:

1. Good enough governance : Prinsip ini menekankan bahwa tata kelola yang baik tidak harus sempurna, tetapi cukup baik untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena tata kelola yang terlalu kompleks dan rumit justru dapat menghambat inovasi dan pengambilan keputusan.
2. Business-driven : Prinsip ini menekankan bahwa tata kelola harus didorong oleh kebutuhan bisnis. Hal ini berarti bahwa tata kelola harus berfokus pada hasil yang ingin dicapai, bukan pada prosesnya.
3. Human focused : Prinsip ini menekankan bahwa tata kelola harus berfokus pada manusia. Hal ini berarti bahwa tata kelola harus dirancang untuk mendukung dan memberdayakan orang-orang yang terlibat dalam prosesnya.
4. Based on quick wins, : Adanya perubahan keadaan sosial masyarakat yang relatif cepat menuntut pemerintah melalui para birokrasinya didalam sebuah organisasi pemerintahan memiliki inovasi yang tanggap, inovatif, cepat dan tepat
5. Systematic and adaptive approach: kemampuan untuk mengatasi perubahan yang cepat secara sistematis.
6. Simple design and continuous refinement : kemampuan dalam membuat struktur yang sederhana dalam peningkatan pencapaian yang sederhana

Dengan adanya perubahan birokrasi meningkatkan efektivitas dari aparatur revolusi industri 4.0 yang mana merupakan tahapan terbaru yang harus dihadapi oleh

semua pihak termasuk pemerintahan Indonesia. pemerintah di paksa bisa beradaptasi dengan transformasi teknologi agar fungsi pelayanan publik menjadi lebih efisien akurat dan lebih cepat. namun menghadapi perubahan industri 4.0 juga dapat menjadi jebakan untuk dalam mentalitas esensialisme, yaitu makna terpenting ASN cerdas yang hadir tampah syarat keadaan tertentu. menurut kutipan yang dikutip dalam jurnal dari Yahya Muhaimin mengatakan bahwa birokrasi merupakan seluruh instansi pemerintahan untuk membantu pemerintahan dalam pelayanan publik sehingga peran demokrasi sangat penting dalam menyatukan pandangan dan sudut pandang antara negara dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan suatu pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga politik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola aset publik (Ansell & Gash, 2008). Singkatnya collaborative governance menjelaskan mengenai kerjasama antara berbagai pihak atau pemangku kepentingan dalam mencapai suatu tujuan. Sebagai salah satu strategi dalam menyelesaikan beberapa persoalan melalui kebijakan yang menekan pada partisipasi dan kolaborasi (Newman et al., 2004)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa collaborative governance merupakan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa stakeholder yang berkaitan baik dari pemerintahan maupun non-pemerintahan dalam mencapai tujuan yang sama, serta bersama mencari solusi dalam menghadapi

permasalahan sehingga dapat memberikan solusi dan inovasi yang efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

1.7.2 Agile Government

Agile Government adalah konsep pemerintahan yang menekankan perlunya pemerintahan untuk bersifat adaptif, responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan lingkungan terutama pada era 4.0 saat ini yang mengharuskan pemerintah ataupun masyarakat beradaptasi dengan adanya teknologi (Malik et al., 2023). Dengan menerapkan Kerangka Agile Government, pemerintahan dapat menjadi lebih cepat, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan, sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi warga negara.

Berdasarkan penjelasan di atas agile government merupakan sistem pemerintahan tangkas mengacu pada kapasitas pemerintah untuk beradaptasi dengan cepat dan gesit terhadap tuntutan yang tidak terduga dan perubahan yang terjadi dalam menghadapi era 4.0 yang mengharuskan pemerintah dan masyarakat beradaptasi dengan adanya teknologi.

1.8 Definisi Operasional

Kerangka Operasional Adaptive dan Collaborative Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Mewujudkan Agile Government Bagi Pelaku UMKM. dalam penelitian ini menggunakan teori dari (Ansell & Gash, 2008)

Tabel 1. 2 Variabel, Indikator dan Parameter Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Collaborative	Pemetaan kondisi awal	Kolaborasi pemerintah-Stakeholder-pelaku UMKM
2.		Desain Kelembagaan / institusi	Struktur dan prosedur kolaborasi
3.		Kepemimpinan	Memfasilitasi dialog dan komunikasi

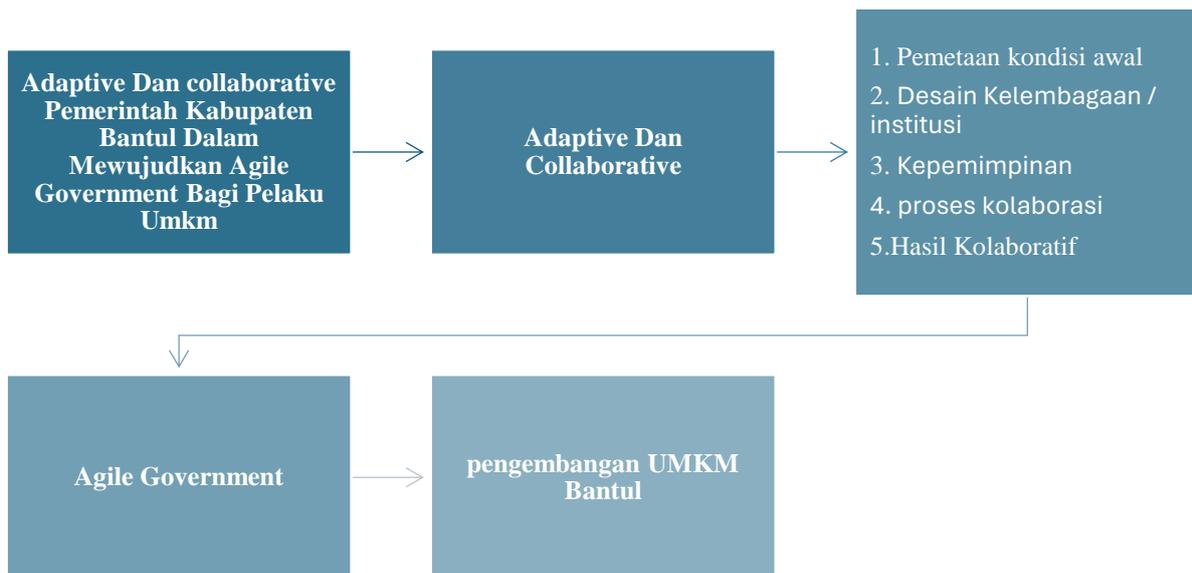
4.		Proses kolaborasi	Solusi dan inovatif
		Hasil Kolaboratif	inovasi dan kelanjutan

Sumber:Olahan peneliti 2023

1.9 Alur Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan penelitian kepada pembaca secara berstruktur sehingga pembaca diharapkan akan lebih mudah dalam memahami tujuan dari topik yang akan diteliti. Berikut kerangka berpikir yang disajikan untuk penelitian ini.

Gambar 1. 5 kerangka berpikir



Sumber: Olahan peneliti 2023

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, metode kualitatif dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat riset serta cenderung menggunakan analisis, yang merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data, keadaan subjek atau objek penelitian kemudian di analisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya serta dapat memberikan informasi yang akurat sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat di terapkan pada berbagai masalah (Sugiyono, 2014)

Oleh karena itu, memberikan pengetahuan tentang fenomena sosial atau fenomena yang diteliti menjadi tujuan utama penelitian kualitatif. Masih banyak lagi karya yang mencantumkan berbagai teknik penelitian kualitatif, termasuk studi kasus, teori dasar, fenomenologi, biografi, dan etnografi. saat memberi instruksi. Setidaknya ada delapan bentuk penelitian kualitatif yang menjadi fokus karya Mudjia Rahardjo: etnografi, studi kasus, observasi alam, studi dokumen/teks (documentary study), fenomenologi (phenomenology), grounded theory, dan sejarah (historical study). (Marlin, Lili, 2020)

Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana adaptive dan collaborative pemerintah kabupaten Bantul dalam mewujudkan agile government bagi pelaku UMKM, serta dapat mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintah serta pelaku UMKM terkait bagaimana pemerintahan kabupaten Bantul dapat beradaptasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang di hadapi akibat adanya pandemi Covid-19 tahun kemarin serta bagaimana pemerintah

bekerjasama dalam mengembangkan UMKM lokal dengan menerapkan sistem agile government.

1.10.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten Bantul lokasi ini di pilih sebagai objek penelitian karena kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki jumlah UMKM terbesar setelah kabupaten Sleman. UMKM di Kabupaten Bantul merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian kabupaten. Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bantul, jumlah UMKM di kabupaten pada tahun 2023 mencapai 107.300 unit. UMKM tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 1,3 juta orang, atau sekitar 60% dari total tenaga kerja di kabupaten.

Penelitian ini akan fokus meneliti pada sistem pemerintah terutama pada dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul serta beberapa stakeholder yang bekerjasama dalam membantu peran pemerintah dalam beradaptasi dan berkolaborasi dalam mewujudkan agile government bagi pelaku UMKM, serta melakukan penelitian terhadap beberapa sektor UMKM Bantul mengenai sejauh mana peran pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi setelah pandemi Covid-19 dan bagaimana UMKM menghadapi era transformasi di era digitalisasi saat ini.

1.10.3 Jenis data penelitian

a. Data primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang di dapatkan peneliti dari kegiatan wawancara dan kunjungan langsung terhadap pemerintah kabupaten Bantul, instansi pemerintah, dan survei UMKM lokal. Pelaksanaan wawancara dan survei tersebut bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang akurat serta kebijakan pemerintah dalam beradaptasi dan kolaborasi dalam mewujudkan agile government bagi para UMKM.

Tabel 1. 3 Sumber Data Primer

Sumber data	Jumlah	Teknik pengumpulan data
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	1 Instansi	Wawancara
Pelaku UMKM Kabupaten Bantul	2 UMKM	Wawancara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1 instansi	Wawancara
Badan perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten Bantul	1 instansi	Wawancara

Sumber: Olahan peneliti 2023

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk dalam berbagai macam informasi yang di dapatkan oleh berbagai sumber sebagai pendukung data primer (Sugiyono, 2019:10). Penelitian ini akan menggunakan berbagai informasi dari beberapa sumber baik dari beberapa media perantara sebagai pihak kedua di mana peneliti tidak mengambil data secara langsung melainkan melalui beberapa situs pemerintah yang menyediakan data terkait peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM serta inovasi yang ditawarkan pemerintah Bantul dalam mengembangkan UMKM dalam mewujudkan agile government.

Tabel 1. 4 Data sekunder

No.	Nama data	Sumber data
1.	Jumlah data UMKM Bantul	Bantulkab.go,ide
2	Data Bantul Online Shop (BOS)	Bantulkab. go.id,
3.	Data Publik SiDAKUI	sidakui.kab-bantul.id
4.	Data pihak yang terlibat dalam kolaborasi BOS	Dkumpp.go,id

Sumber: Olahan peneliti 2023

1.10.4 Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait peran pemerintah kabupaten Bantul dalam beradaptasi dan kolaborasi guna mewujudkan agile government dalam UMKM. instrumen yang digunakan untuk wawancara berupa sejumlah pertanyaan semi struktur, sehingga dapat memperdalam informasi dari narasumber.

b. Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini dokumentasi yang di maksud berupa catatan tertulis yang diterima peneliti dari narasumber terkait suatu hal yang telah terjadi baik fakta dan data terkait kolaborasi pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era digitalisasi dengan mewujudkan Agile government serta data terkait kondisi UMKM setelah terjadinya pandemi Covid-19 dari BPS sebagai bahan dokumentasi yang dapat dilampirkan dalam penelitian. Studi dengan melakukan penyelidikan data dokumen penting, jurnal, berita, dan file terangkum dalam rangkaian dokumentasi penelitian.

1.10.5 Teknik analisis data

Data dalam penelitian ini akan disusun dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yang dicapai dengan mengategorikan data dan memberikan penjelasan kata atau frasa terhadapnya. Oleh karena itu, laporan penelitian akan memuat kutipan data yang memberikan ringkasan penyajian laporan berdasarkan analisis isi dan naskah wawancara. Analisis data dilakukan mulai dari :

a. Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, tahap awal yang dilakukan adalah membuat draf pertanyaan wawancara yang sesuai dengan deskripsi operasional yang sudah di buat di

awal serta di sesuaikan dengan indikator yang ada selanjutnya melakukan tahapan wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat. Setelah melakukan wawancara baru memeriksa kelengkapan data. tahap ini dilakukan setelah data di kumpulkan. Selanjutnya peneliti dapat memeriksa kualitas data yang di dapatkan dengan cara mengamati apakah jawaban yang di dapatkan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

b. Menganalisis Data

Peneliti menganalisis Informasi atau data yang dikumpulkan selanjutnya harus didokumentasikan dengan cermat dan menyeluruh. Jumlah data yang diperoleh harus diminimalkan, yang berarti merangkum, memilih elemen-elemen kunci, berkonsentrasi pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola utama. Hasil reduksi data menyajikan gambaran yang lebih koheren dan memudahkan perolehan data lebih lanjut dan bila diperlukan pencarian data tertentu. Untuk memudahkan pengambilan kesimpulan, data wawancara hasil analisis penelitian mengenai respons Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap UMKM terdampak pandemi Covid-19 ini diringkas dan kemudian diklasifikasi serta mencari data terkait bagaimana program yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM apakah sudah di jalankan secara maksimal atau belum melalui pelaku UMKM .

c. Menafsirkan Hasil Analisis

Penelitian diakhiri dengan pemberian kesimpulan, yaitu rangkuman atau analisis keseluruhan temuan penelitian. Untuk mengurangi kekurangan dalam validitas data, peneliti juga harus memvalidasi data dan mempelajari temuan setelah menyajikan kesimpulan awal tersebut. Kesimpulan kualitatif terdiri dari temuan-temuan baru yang belum diketahui sebelumnya.